

MENEMUKAN AKAR MASALAH DAN SOLUSI ATAS KONFLIK PAPUA: SUPENKAH?

Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay

Abstract

This paper describes and analyse the root of the problem and what is the solution to end conflict in Papua. It started with the gloomy of social and economic conditions in Papua and the strategy to improve that conditions. It followed by unfinished conflict in Papua since 1963 till date which caused by so many aspects, namely suspicious between the military and the quite number people of Papua, traumatic situation among the Papuans, in particular those who have been experienced with the military culture of torturing the people of Papua, socio-economic conditions in Papua which caused sceptical views among Papuans towards the central government. Special autonomy for Papua which started in 2002 has not been successful in bringing the people of Papuan enjoy security and prosperity, the basic social and economic rights of the human being. The paper closed with the the question whether Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) or Special Unit (Task Force) for the Development in Papua and West Papua will be able to strengthen the capacity of Papuans in bureaucracy and economic affairs and to speed up development of facilities such as roads, bridges, airports and sea ports in Papua in order to speed up economic development in Papua. The most important things is how to improve the condition of Papua people.

Keywords: *Papua, conflict, military, economic development, Special Unit (Task Force) for the Development in Papua and West Papua*

Abstrak

Paper ini menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua. Tulisan diawali dengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan paparan konflik yang belum selesai di Papua sejak 1963 hingga saat ini. Konflik tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua, situasi traumatis di antara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang-orang Papua serta kondisi sosio-ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptis di antara orang Papua terhadap Pemerintah Pusat. Otonomi spesial bagi Papua yang dimulai pada 2002 belum berhasil membawa rakyat Papua menikmati keamanan dan kemakmuran yang merupakan hak dasar sosial dan ekonomi manusia. Paper ini ditutup dengan pertanyaan apakah Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) akan mampu meningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan fasilitas seperti jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Hal yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kondisi rakyat Papua ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: Papua, konflik, militer, pembangunan ekonomi, Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B)

Pengantar

Tanpa terasa, 50 tahun sudah Papua menjadi bagian dari Indonesia. Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui perjanjian internasional, yaitu Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Hingga kini di wilayah tersebut masih terus terjadi konflik, baik

konflik vertikal antara sebagian rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia maupun konflik horizontal antarsesama masyarakat di tanah Papua yang terkait dengan persoalan politik, ekonomi ataupun sosial budaya.

Papua adalah sebuah wilayah yang serba kompleks. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan budaya, tetapi sebagian besar penduduk

asli Papua masih amat miskin, bahkan ada sebagian kecil masyarakatnya yang hidup seakan masih berada di zaman batu muda (*neo-lithicum*). Dari sisi topografi, wilayah Papua terdiri atas wilayah pantai, lembah, gunung, dan pulau-pulau besar dan kecil. Papua adalah wilayah Indonesia yang paling banyak kelompok etniknya, sekitar 250-an kelompok etnik dihitung dari jumlah bahasa yang mereka gunakan. Ini yang menjadikan Indonesia adalah negara nomor dua di dunia yang memiliki jumlah bahasa terbanyak setelah Papua Nugini (PNG) yang memiliki sekitar 700 bahasa atau kelompok etnik.

Tulisan ini saya beri judul “Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenakah?” *Supen* adalah bahasa gaul di Papua yang artinya “su(dah) pen(ting)” dan perlu diberi akhiran “kah” karena bersifat tanda tanya. Jika mencari akar masalah dan solusi atas konflik di Papua menjadi amat penting, tak ada kata lain jika pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh rakyat Papua perlu duduk bersama untuk berdialog dari hati ke hati.

Sebelum berdialog, rakyat Papua tentunya harus memilih siapa yang akan menjadi juru bicara mereka, tentunya bukan orang Papua yang sudah lama tinggal di luar negeri karena mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi Papua saat ini. Mereka juga harus sudah memiliki agenda dan alternatif tuntutan yang dibawa kepada pemerintah Indonesia, bukan penarikan diri Papua dari Indonesia seperti yang pernah disuarakan oleh 100 tokoh Papua kepada Presiden B.J. Habibie pada Februari 1999. Dari pihak pemerintah Indonesia, harus dan perlu menyiapkan tawaran-tawaran konkret yang bukan sekadar otonomi khusus, tetapi juga bagaimana menyejajarkan posisi orang-orang Papua sebagai anak kandung republik.

Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian utama. Pertama, pengantar yang memberi arah apa yang menjadi tujuan utama tulisan ini. Kedua, data-data dasar Papua. Ketiga, persoalan Papua dan bagaimana mencari solusi atas akar masalah tersebut.

Data Dasar Papua: Negeri Kaya, Penduduk Miskin

1. Sumber Daya Alam Papua yang Berlimpah

Menurut data Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2009, Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Papua saat ini terdapat sebanyak 2,5 miliar ton kandungan cadangan bahan tambang Emas dan Tembaga (konsesi Freeport saja), 540 juta meter kubik potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektare hutan konversi perkebunan skala besar. Selain itu, dengan panjang pantai 2 ribu mil laut dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi, Papua memiliki potensi perikanan 1,3 juta ton per tahun.

Jika kita baca data kekayaan alam Papua, tentunya itu suatu anugerah yang ternilai harganya yang dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Papua. Pendapatan dari kekayaan alam yang sebagian besar dikelola oleh asing tersebut tentunya sebagian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara di berbagai daerah di tanah Papua sehingga keterisolasian penduduk di pedalaman dapat dibuka agar rakyat dapat melakukan mobilitas horizontal secara baik. Ini juga akan menjadikan ekonomi rakyat Papua juga semakin baik.

Selain itu, pemerintah juga harus memiliki program jangka pendek, menengah, dan panjang yang lebih berkesinambungan terkait dengan pembangunan sarana pendidikan di semua wilayah Papua, dari wilayah pantai, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan. Ini semua ditujukan agar anak-anak Papua dapat menikmati pendidikan yang sejajar dengan yang dinikmati oleh anak-anak Indonesia di luar tanah Papua.

Selama ini kita melihat bahwa kekayaan alam Papua ternyata tidak menjadikan rakyat Papua menikmati kemakmuran hidup yang sebanding dengan kekayaan alam itu. Kita juga harus mempersiapkan anak-anak Papua untuk mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, khususnya untuk menghadapi kenyataan setelah kekayaan alam itu terkuras habis.

Namun, kenyataan yang ada menunjukkan betapa terbaliknya antara kekayaan dan kehidupan riil rakyat Papua yang miskin dan terbelakang, khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem transportasi modern. Mobilitas horizontal dan vertikal mereka juga mengalami hambatan yang menjadikan mereka sulit untuk lepas dari kemiskinan yang bersifat struktural.

2. Provinsi Termiskin Nomor Satu di Indonesia

Ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dari 2 juta lebih penduduk yang ada saat ini, hampir setengah penduduk Papua, yaitu 40,78% hidup dengan status Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2010, Provinsi Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia, yakni 34,88%. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sumber daya alamnya lebih rendah dari Provinsi Papua justru angka kemiskinan lebih baik, misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 23,03%, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 21,55%, Provinsi Bangka Belitung 18,94%. Padahal saat ini Papua adalah provinsi dengan kewenangan Otonomi Khusus (UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua) dengan dana pembangunan per kapita tertinggi di Indonesia. Total dana otonomi khusus 2002–2009 sebesar 9,353 triliun rupiah dan untuk pembangunan infrastruktur 2007–2009 dananya mencapai 2,5 triliun rupiah. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Papua adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Provinsi Papua yang juga paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 2,99%. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya maupun juga secara nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan hanya 0,68% sampai dengan 1% saja.

Kemiskinan yang ada di tanah Papua ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab tidak sedikitnya gangguan keamanan di tanah Papua. Rakyat miskin tentunya tidak berdaya untuk menerobos kesulitan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan bagi anak-anaknya. Tidak sedikit dari mereka yang juga terkungkung di dalam pemikiran bahwa alam sudah memberikan

mereka kehidupan dan anak-anak lebih baik membantu orang tuanya untuk melakukan pengumpulan makanan dari alam tempat mereka tinggal (*food gathering*) dan ada juga yang harus membantu orang tua mereka untuk berkebun (*food producing*). Karena itu, mereka tidak memiliki waktu yang baik untuk sekolah agar mereka memiliki kapasitas meningkatkan status sosial ekonomi mereka melalui bekerja atau berwiraswasta.

Isolasi alam, dominasi pendatang, terpinggirkannya penduduk asli Papua dari pasar-pasar tradisional dan kurang terbukanya lapangan kerja di sektor riil dan pariwisata menjadikan rakyat Papua sulit untuk keluar dari kemiskinan struktural tersebut.

3. Tingkat Inflasi dan Biaya Hidup Tertinggi

Tinggi-rendahnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di suatu daerah. Stabilitas harga di Provinsi Papua selain disebabkan oleh peningkatan inflasi tiap tahun, juga diakibatkan karena jarak tempuh distribusi barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke Provinsi Papua yang sangat jauh sehingga memakan biaya transportasi besar. Selain itu, minimnya infrastruktur jalan dan jembatan dari kota ke daerah pedalaman atau dari daerah pantai ke daerah pegunungan menyebabkan angkutan udara adalah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok atau bahan-bahan material pembangunan. Kalau pun alat transportasi udara ada, harganya amat tinggi dan hanya menjangkau kota-kota besar di pegunungan. Karena itu, jangan heran bila harga-harga di wilayah pegunungan amat tinggi.

Mari kita lihat contoh soal harga semen. Di Provinsi Papua, harga semen 1 sak di Jayapura Rp70.000, Wamena Rp500.000, dan Puncak Jaya Rp1,2 juta. Harga beras bermerek berisi 25 kilogram Rp750.000–Rp800.000 per karung di Puncak Jaya, sedangkan di Jakarta, beras yang bermerek dan bermutu tinggi seperti pandanwangi atau rojolele untuk 25 kilogram hanya Rp80.000 per karung. Di Pegunungan Bintang, harga bensin premium untuk 1 liter mencapai Rp40.000, sedangkan saat ini harga nasional hanya Rp4.500. Melambungnya harga barang

di daerah pedalaman Papua ini, selain karena adanya tingkat inflasi yang tinggi, juga karena moda transportasi untuk melayani penduduk pedalaman Papua hanya melalui jaringan transportasi udara. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua belum mampu melakukan upaya pengendalian jalur distribusi barang dari pusat produksi sampai di konsumen di wilayah Papua. Padahal, konsumen terbanyak berada di pedalaman Papua yang merupakan jumlah penduduk paling padat, yaitu 1,2 juta di 10 kabupaten yang ada di daerah pegunungan Tengah Papua, atau 60% dari keseluruhan jumlah penduduk Papua.

4. Provinsi Papua, Belum Ada Grand Design Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua, pemerintah pusat telah menargetkan 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010–2014, yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas membutuhkan dana sebesar 9,78 triliun rupiah atau sekitar 2 trilion rupiah per tahun menurut DPU Papua.¹ Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah Nabire–Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura–Wamena dan Mulia (733 km), Timika–Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui–Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura–Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke–Waropko (557 km), dengan total 2.056 km. Sementara itu, 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sebanyak 361 km, yaitu Depapre–Bongrang, Wamena–Timika–Enarotali, dan *Ring Road* Jayapura. Strategi penerobosan isolasi dan daerah terpencil di Papua tersebut merupakan program pemerintah pusat. Meskipun periode pemerintahan ini sudah berakhir, namun sampai saat ini pemerintah Provinsi Papua belum mempunyai *grand design* pembangunan infrastruktur di Papua.

Pembangunan jalan strategis itu memang tidaklah mudah. Contohnya, jalan Trans Irian yang ingin menembus isolasi di wilayah perbatasan dari Jayapura–Abepura–Arso–Senggi–Waris–Mindiptana–Tanah Merah–Sota–Merauke yang sudah dirintis sejak 1983, hingga kini belum selesai. Selain kesulitan bahan material batu kali,

tanah yang labil serta curah hujan yang tiada putus sepanjang tahun juga menjadi kendala pembangunan prasarana jalan di Papua.

Namun, segala rintangan itu dapat diatasi jika pemerintah pusat serius untuk membangun Papua. Kita masih menunggu apakah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Let.Jend. TNI (Purn.) Bambang Dharmono akan benar-benar dapat merealisasikan programnya untuk membangun prasarana jalan sesuai dengan salah satu mandat yang diberikan kepadanya.

Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara. Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 serta tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pemerintah akan menghidupkan kembali berbagai lapangan terbang yang dibangun Jepang atau Sekutu pada Perang Dunia II yang tersebar di wilayah Papua? Akankah pemerintah juga membangun atau memperpanjang landasan lapangan-lapangan terbang lainnya di daerah pedalaman yang hingga kini masih terisolasi? Akankah ada penerbangan-penerbangan swasta lainnya, seperti Susi Air yang akan menjadi pemain-pemain baru dalam usaha transportasi udara reguler atau sewaan di tanah Papua.

5. Miskin di Tengah Kelimpahan Harta

Seperti ditulis di bagian awal tulisan ini, Papua adalah negeri yang kekayaan alamnya amat melimpah. Namun, penguasaan atas eksplorasi kekayaan alam itu sebagian besar berada di tangan asing. Salah satu perusahaan tambang yang sering disorot di Papua adalah PT Freeport Indonesia yang bukan hanya menghasilkan tembaga, melainkan juga perak, emas, uranium, dan material tambang lainnya. Manfaat dari keberadaan Freeport di tanah Papua bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Papua terasa tidak seimbang dengan penerimaan Freeport dan permasalahan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia kepada kehidupan rakyat Papua.

Per 31 Desember 2011 Freeport memiliki cadangan 119,7 miliar pounds tembaga, 33,9

¹http://dpu-papua.blogspot.com/2010_04_11_archive.html.

juta ons emas, dan 330,3 juta ons perak, dan 0,86 miliar pounds cobalt, dan 95% cadangan Freeport itu ada di tambang Grasberg, Papua. Pada 20 Desember 2010 cadangan tambang Grasberg sebanyak 2.574.744 ton dengan kadar tembaga 0,98%, emas 0,83% gram per ton (g/t atau part per million-ppm), dan perak 4,11 g/t. Freeport Indonesia mampu memproses 200.000–250.000 ton bijih per hari. Tambang terbuka Grasberg berkontribusi 75%, sedangkan tambang bawah tanah sekitar 25%.² Dari sisi saham, Freeport McMoran menguasai 90,64 saham di PT Freeport Indonesia dan hanya 9,36% saham yang dimiliki pemerintah Indonesia! Ini sangat tidak adil dan menyakitkan. Bandingkan dengan saham negara Amerika Latin di mana Freeport McMoran juga beroperasi yang bisa mencapai 32%.

Dalam laporan keuangan 2010, PT Freeport Indonesia menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US\$3,69 per pounds atau dengan kurs Rp9.000,- berarti setara dengan 39,42 triliun rupiah. Freeport juga menjual 1,8 juta ons emas dengan harga rata-rata sebesar US\$1.271 per ons atau dengan kurs Rp9.000,- setara dengan 20,59 triliun rupiah. Jadi, total penjualannya mencapai 60,01 triliun rupiah. Itu baru dari tembaga dan emas, belum dihitung mineral lain seperti perak dan cobalt. Satu hal yang mencengangkan, *Majalah Forbes* menobatkan James Moffatt (sic!), bos besar Freeport Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh pria bergaji tertinggi di dunia. Angkanya: US\$48 juta atau sekitar 432 miliar sepanjang 2006, terlalu jauh untuk dijangkau penduduk Papua yang hanya bisa mengantongi maksimal US\$ 240 per tahun atau sekitar 2 juta, bahkan setelah Freeport 37 tahun beroperasi di sana.³

Namun, kerusakan lingkungan sebagai dampak dari eksplorasi tambang sangatlah masif! Setiap tahun Indonesia kehilangan 300.000 hektare hutan, belum lagi pencemaran lingkungan akibat pembuangan *tailing* atau limbah tambang ke lembah Cartenz, lembah Wanagon, dan sungai Ajkwa. Secara khusus, sungai Ajkwa mengalami pendangkalan di beberapa titik, dari

semula 50 meter, kini tinggal 5 meter. Pada 2001, *tailing* tersebut telah mencapai laut Arafuru dan gradasi pencemaran lautnya mencapai 10 km dari garis pantai.⁴

Memang ada manfaat dari keberadaan Freeport bagi pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan sebagian elite sipil, polisi, ketua adat, dan militer di Jakarta dan Papua. Ada juga program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Freeport untuk tujuh suku yang terkena dampak pertambangan tersebut, dari pemberian beasiswa, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi, sekolah asrama, pelatihan teknik bagi para calon pegawai Freeport atau subkontraktor Freeport di Institute Newangkawi, pembangunan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut dan sebagainya. Freeport memang sudah membangun pusat latihan kerja di Timika (Newangkawi) untuk melatih para calon pekerja Freeport. Dari mereka yang dilatih, masih banyak penduduk asli Papua yang kurang tahan untuk mengikuti disiplin kerja yang dipersyaratkan oleh Freeport. Mereka yang *drop out* dari tempat latihan kerja tersebut masih cukup banyak, sebagian besar berasal dari penduduk asli di sekitar pertambangan Freeport.

Namun, secara keseluruhan apa yang didapat penduduk setempat hampir-hampir tak sebanding dengan penderitaan panjang yang mereka alami sejak tambang itu mulai dibangun pada 1967. Jika mereka protes, mereka dicap sebagai anggota atau pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jika ada pembunuhan atau penyerangan, OPM pasti menjadi kambing hitamnya. Jika para buruh mogok, seperti terjadi pada 15 September sampai 17 Desember 2011 lalu, tidak jarang para pekerja ini juga dipandang sebagai penghambat pembangunan dan merugikan negara karena berkurangnya pendapatan negara akibat pemogokan itu.

Aksi mogok 8.000 dari 23.000 karyawan Freeport itu telah memengaruhi produksi Freeport pada kuartal pertama 2012, yaitu penurunan produksi tembaga dari 284 juta pound pada 2011 menjadi hanya 123 juta pound pada kuartal pertama 2012. Produksi emas juga

² <http://satunegeri.com/95-cadangan-freeport-ada-di-indonesia.html>.

³ <http://satunegeri.com/tegakkan-kedaulatan-di-tambang-freeport-bukan-sekedar-renegosiasi.html>.

⁴ <http://satunegeri.com/referendum-rakyat-indonesia-untuk-tutup-freeport.html>.

menurun dari 441.000 ons pada 2011 menjadi hampir separuhnya, yakni 229.000 ons pada kuartal pertama 2012. Penerimaan negara juga menurun drastis karena kehilangan sekitar US\$6,7 juta (57,3 miliar rupiah) per hari selama pemogokan berlangsung, sedangkan potensi penurunan penjualan Freeport mencapai US\$19 juta per hari. Kegiatan Freeport di lahan seluas 213.000 hektare itu menyumbang 68% PDRB Papua dan 96% PDRB Kabupaten Timika. Pada 2010, Freeport menyumbang US\$ 1,9 miliar dari pajak dan US\$2,1 miliar berupa gaji dan upah karyawan.⁵

Sisi lain yang juga sering muncul dalam pemberitaan, tidak sedikit dana yang dikeluarkan Freeport Indonesia untuk membantu mobilitas pasukan TNI dan Polri bukan saja di wilayah kontrak karya Freeport, melainkan juga dari Timika ke daerah pegunungan lainnya. Anggaran yang tinggi itu sebagian besar untuk transportasi udara, termasuk penggunaan helikopter dan mobilitas di darat. Semua pengeluaran anggaran PT Freeport untuk keamanan bisa dilihat dalam laporan tahunan Freeport. Antara tahun 2001–2011, Freeport mengeluarkan anggaran untuk keamanan sebesar US\$79 juta yang pada tahun 2011 saja jumlahnya sebesar US\$14 juta.

6. Bahaya HIV/AIDS yang Mengancam Papua

Kasus-kasus HIV–Positif yang terdeteksi melalui survailans dengan bantuan hasil *test reagent* ELISA maupun juga *Western blot*, tercatat bahwa sampai dengan Agustus 2010 di Provinsi Papua sebanyak 5.000 warga Papua terkena AIDS. Diprediksikan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS akan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang. Berbeda dengan kasus HIV/AIDS di Pulau Jawa yang penularannya melalui jarum suntik, untuk Provinsi Papua penularannya lebih banyak melalui hubungan seksual sembarangan. Peningkatan jumlah prevalensi HIV/AIDS ini akan terus meningkat secara deret ukur, sementara angka kelahiran mengalami pertumbuhan minimal (*minimizing zero growth*) secara deret

hitung sehingga diperkirakan penduduk Papua terancam berkurang drastis.

Penyebaran HIV/AIDS bukan hanya terjadi di daerah-daerah pelacuran di wilayah pantai, melainkan sudah meluas sampai ke wilayah pegunungan tengah. Hal ini terjadi antara lain karena adanya dana otonomi khusus melalui program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) yang diterima oleh masyarakat, tidak jarang digunakan oleh pemuda kampung untuk mendapatkan kenikmatan sesaat bersama pekerja seks komersial tanpa alat pelindung atau kondom. Penyebaran HIV/AIDS awalnya disebarkan oleh para pelaut dari Thailand, namun kini sudah menyebar bahkan sampai ke wilayah negara tetangga, Papua Nugini (PNG).

7. Epidemik Korupsi yang Menggurita di Papua

Dalam pandangan sebagian orang, Otonomi Khusus (Otsus) Papua diasosiasikan dengan materi (uang) triliunan rupiah. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika hampir semua orang berebutan menikmati dana Otsus yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat Papua. Ada dua gejala korupsi yang terjadi di Papua saat ini. *Pertama*, korupsi yang terstruktur, sistemik, dan masif (TSM) dilakukan oleh pejabat publik, baik birokrat, politisi, maupun pengusaha. Korupsi secara sistemik berlindung di balik administrasi yang rapih. *Kedua*, fenomena korupsi yang terjadi karena pemberian dana Otsus ke tiap kampung tanpa petunjuk teknis dan petunjuk operasional tentang pemanfaatan dana tersebut secara optimal. Sebagian besar kepala kampung belum mengetahui pemanfaatan dan pelaporan penggunaan dana yang dibagikan melalui Program Respek. Hal ini terjadi karena semata-mata kurang adanya pembinaan dari pemerintah kepada pimpinan kampung.

Kasus korupsi di Papua yang mencuat, di antaranya kasus korupsi mantan Bupati Wamena David Hubi yang saat ini masih di penjara; penyelewengan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) oleh Bupati Yapen Waropen, Ir. Daud Soleman Betawi, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Kabupaten Mimika, Kepolisian Daerah Papua

⁵<http://www.bisnis.com/articles/pemogokan-freeport-rugikan-negara-rp57-3-miliar-per-hari>.

telah menangani kasus penyalahgunaan barang inventaris rumah negara yang dilakukan oleh anggota DPRD Mimika, Ny. Yolanda Tinal (Istri Bupati Clemens Tinal), dengan aset mencapai 5 miliar rupiah. Sementara itu, di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2008, sudah tujuh pelaku korupsi yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Biak di lembaga masyarakat. Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo, saat ini ditahan di Penjara Cipinang Jakarta dan diancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Kasus dugaan korupsi sebesar 5,2 miliar rupiah yang melibatkan Ketua DPRP, Drs. Jhon Ibo, M.M., begitu pula halnya dengan kasus proyek fiktif Kabupaten Sorong Selatan yang menyeret Kepala BPKAD Provinsi Papua, Achmad Hatari, sebagai tersangka; bantuan senilai 19 miliar yang diduga tanpa melalui tender kepada TV Metro Papua oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, S.H., dan sederet kasus korupsi lainnya.

Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy (PERC)" yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Sementara itu, Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilakukan pada September sampai dengan Desember 2008, bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat. Yogyakarta kota terbersih dari korupsi mendapatkan skor tertinggi, yaitu 6,43. Sementara itu, Manokwari (3,39) termasuk kota terkorup, dan rata-rata sebagian besar kota di Provinsi Papua termasuk jajaran 10 besar kota terkorup di Indonesia.

8. Indeks Pembangunan Manusia Paling Rendah di Indonesia

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari perbandingan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dari angka tingkat baca tulis pada orang dewasa serta standar hidup layak maka untuk Indonesia pada tahun 1999 IPM 64,3% menjadi 71,17% di tahun

2008. Sementara itu, Provinsi Papua tahun 1999 IPM 58,8% menjadi 64% di tahun 2008. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua paling rendah dari rata-rata nasional dan terendah di antara provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan bila dibandingkan dengan provinsi yang termiskin sumber daya alamnya seperti Sulawesi Utara 69%; Bengkulu 72,14%; Jambi 71,99%; untuk tahun 2008.⁶

9. Tingkat Partisipasi Pendidikan Terendah di Indonesia

Pada tahun 2007, tingkat partisipasi pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Papua 82,92% (BPS Papua, 2008), sedangkan rata-rata nasional lebih dari 93,75%. Dengan angka ini menempatkan Provinsi Papua berada di posisi ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia, artinya tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi Papua paling rendah di Indonesia. Bila kita menganalisis secara mendalam ternyata tingkat partisipasi pendidikan Provinsi Papua 2007 sebesar 82,92% lebih buruk atau cenderung menurun daripada tahun 2004, yaitu 85,21%.⁷

Ini terjadi karena berbagai penyebab. *Pertama*, orang tua murid yang masih belum memahami pentingnya pendidikan. *Kedua*, sarana dan prasarana pendidikan yang amat terbatas. *Ketiga*, keterbatasan guru yang benar-benar ingin mengabdikan untuk meningkatkan SDM di tanah Papua. Apa yang digambarkan Film "Denias, Senandung di atas Awan" yang menceritakan seorang anak cerdas bernama Denias yang sekolah di pedalaman Papua dan harus dididik oleh "Maleo" (anggota Kopassus) karena tidak ada guru, atau film "Di Timur Matahari" yang mengisahkan betapa rindunya anak-anak di Kabupaten Lani Jaya akan datangnya guru pengganti serta perdamaian di daerahnya, adalah dua karya PT Alenia Film yang amat mengesankan sekaligus menimbulkan simpati kita pada anak-anak Papua. Anak-anak Papua bukanlah anak-anak yang malas dan bodoh, melainkan kurang

⁶ <http://tabloidjubi.com/index.php/jayapura/11766-ipm-papua-paling-terendah-perlu-ditingkatkan>, lihat juga, http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menu-rut_IPM.

⁷ <http://www.docstoc.com/docs/66364566/Laporan-Akhir-EKPD-2010-Provinsi-Papua-oleh-Universitas-Cenderawasih>

kesempatan untuk bersekolah secara normal. Buktinya, tidak sedikit anak-anak Papua yang kini dapat meraih medali emas atau perak dari Lomba Fisika atau Matematika Internasional di bawah bimbingan Prof. Johannes Surya.

10. Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah

Kepadatan Penduduk Provinsi Papua tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 1971. Pada tahun 1971, kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah 2 orang penduduk tiap 1 km², dan pada tahun 1990 menjadi 5 orang penduduk tiap 1 km², kemudian pada tahun 2005 kepadatan penduduk di Papua tidak mengalami peningkatan, tiap km² hanya dihuni oleh 7 orang.⁸

Jumlah tersebut berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, misalnya Jawa Barat 757 orang tiap 1 km², Sumatra Utara 169 orang tiap 1 km². Selain itu, masih lebih rendah dari kepadatan penduduk rata-rata nasional, 116 orang tiap 1 km². Bila dianalisis, ternyata pemerintah Provinsi Papua kurang memperhatikan aspek penataan ruang dan penduduk lokal di Papua.

Namun, data kuantitatif terasa berbeda dengan kenyataan di daerah-daerah perkotaan di Provinsi Papua. Perkembangan penduduk tampak begitu pesat, walau secara rata-rata memang masih amat rendah. Pertambahan penduduk di perkotaan terjadi karena urbanisasi dan mobilitas horizontal penduduk yang datang dengan pesawat terbang ataupun kapal-kapal PT Pelni. Setiap bulan kapal-kapal Pelni menurunkan penumpang dari daerah lain di Indonesia yang mencari penghidupan baru di tanah Papua.

11. Penduduk Papua Terancam Berkurang Drastis

Jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 1971 adalah sebanyak 923.449 jiwa, sedangkan berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 menjadi 1.684.144 jiwa, dan pada tahun 2005 menjadi 1.875.388 jiwa. Pada tahun yang sama untuk Provinsi Sumatra Utara mengalami peningkatan

secara drastis dari 6.621.831 jiwa di tahun 1971 menjadi 11.642.488 di tahun 2000 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 12.450.911 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk nasional mengalami peningkatan dari 119.208.229 jiwa di tahun 1971 dan 205.132.458 pada tahun 2000 serta 237,6 juta jiwa di tahun 2010.⁹

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua untuk kurun waktu 1971–1980 adalah 2,67%. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan pada kurun waktu 2000–2005, yaitu 2,17%.¹⁰ Dengan melihat perbandingan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua dengan pertumbuhan penduduk Nasional maupun juga Provinsi Sumatra Utara maka, baik Provinsi Sumatra Utara maupun nasional justru mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lebih besar. Adapun untuk Provinsi Papua dilihat dari rasio pertumbuhan penduduk, baik dari segi kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*), penduduk yang masuk (*in-migration*) maupun juga penduduk yang keluar (*out-migration*) maka Papua mengalami pertumbuhan minimal (*minimizing zero growth*).

Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah penduduk Papua stagnan atau bahkan lebih cenderung menurun adalah rasio Angka Kematian Bayi (ABK). Untuk Provinsi Papua, rasio angka kematian bayi mencapai 63,33% untuk laki-laki dan 50,34% untuk perempuan sehingga rata-rata rasio kematian bayi di Provinsi Papua sebesar 56,65%. Rasio angka kematian bayi ini tertinggi di Indonesia bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, misalnya dengan DKI Jakarta rasionya hanya 24,79%, Sumatra Utara 43,69%, Jambi 47,68%.¹¹

Berikut ini perbandingan antara migrasi yang masuk (*in-migration*) maupun migrasi yang keluar (*out-migration*). Pada tahun 1971 migrasi yang masuk ke Papua 33.513 jiwa, sedangkan migrasi yang keluar di tahun yang sama sebanyak 6.446 jiwa. Kemudian pada tahun 1990 migrasi yang masuk 93.030 jiwa dan migrasi keluar 15.555 jiwa. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2000, migrasi yang masuk 332.308 jiwa dan migrasi yang keluar 46.824 jiwa. Bila

⁸ <http://www.google.co.id/search?q=kepadatan+penduduk+papua&hl=id&client=firefox-a&hs=k9J&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ffAhUNm5JozLrQe3qICYCA&ved=0CFwQsAQ&biw=1360&bih=627>, lihat juga, <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/9400.pdf>, lihat juga, <http://www.scribd.com/doc/50174117/Statistik-Daerah-Prov-Papua-Barat-2010-pdf>.

⁹ <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/9400.pdf>.

¹⁰ http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2.

¹¹ <http://www.batukar.info/wiki/demografi-papua>.

dilihat dari data tersebut maka jumlah penduduk Papua yang keluar dari Provinsi Papua sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk luar yang masuk ke Papua. Hal ini tentu saja menyebabkan jumlah penduduk Papua asli lebih sedikit dibanding jumlah penduduk dari luar Papua sehingga tidak mengherankan jika sering kali terjadi masalah-masalah bias migran (*migran bias risk*) atau menimbulkan riak-riak kecil di publik. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua, kabupaten dan kota seharusnya mulai khawatir bila terjadi ancaman kepunahan ras atau suku bangsa Melanesia di bumi Papua¹².

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Migran Masuk dan Migran Keluar di Papua (1971–2000)

No.	Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar
1.	1971	33.513	6.445
2.	1980	93.030	15.559
3.	1990	261.308	30.786
4.	2000	332.015	46.824
Jumlah		719.866	99.614

Sumber: Data diolah dari Sensus Penduduk BPS, 1971, 1980, dan 2000

Bagaimana Kesiapan Pemuda Papua Saat ini?

1. Penduduk Berusia Muda, Buta Huruf Terbanyak

Persentase penduduk Papua berusia muda 15–44 tahun yang buta huruf (tidak bisa baca dan tulis) pada tahun 2008 sebesar 26,23%. Persentase penduduk berusia muda yang buta huruf di Provinsi Papua terbanyak di Indonesia bila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 1,94%. Sementara penduduk buta huruf terbanyak setelah Papua adalah Provinsi NTB (7,54%). Demikian pula bila kita bandingkan dengan provinsi lain misalnya dengan Maluku (1,15%), Kalimantan Timur (1,04%), Sumatra Utara (0,81%), dan lainnya yang persentasenya tidak lebih dari 2%.¹³

¹²Kami berdua penulis, sebagai orang Jawa dan seorang Intelektual Putra Papua yang sangat memahami tentang kependudukan dan dinamika penduduk, tanpa prasangka buruk terhadap suku manapun di Indonesia, kebijakan kependudukan yang memproteksi penduduk pribumi Papua dari ancaman kepunahan sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh semua komponen bangsa, baik pemimpin di Papua maupun pemimpin di Jakarta.

¹³Lihat antara lain, <http://aweidabii.blogspot.com/2011/09/tingkat-putus-sekolah-dan-buta-huruf-di.html>.

Ekspedisi Tanah Papua yang dilakukan harian *Kompas* pada 2007 dan 2012 menunjukkan masih ada anak-anak Papua yang masih sulit baca tulis walaupun telah sampai jenjang Sekolah Menengah Atas. Namun, ini bukan berarti bahwa gairah anak-anak Papua untuk sekolah amatlah minim. Gerakan Indonesia Mengajar, khususnya di tanah Papua menunjukkan walaupun listrik amatlah terbatas, bahkan tidak ada sama sekali, tampak nyata betapa mereka tetap memiliki gairah belajar yang amat tinggi. Apa yang diperlihatkan dalam film “Di Timur Matahari” produksi PT Alenia Film pada Mei 2012 juga menunjukkan betapa anak-anak Papua juga ingin maju seperti saudara-saudara mereka di belahan lain Indonesia. Namun, keterbatasan guru dan masih seringnya guru-guru meninggalkan sekolah karena harus mengambil gaji di ibu kota provinsi atau kabupaten, amat mengganggu proses belajar mengajar di tanah Papua.

2. Pemuda Papua Terkait Partisipasi Pendidikan

a. Angka Buta Huruf Pemuda Papua Tertinggi di Indonesia

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tahun 2008 secara nasional: 1) Tidak/Belum Pernah Sekolah 1,27%; 2) Masih/Sedang Sekolah 17,34%; 3) Tidak Sekolah Lagi 81,40%. Untuk Provinsi Papua, pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan di tahun 2008 adalah 1) Tidak/Belum Pernah Sekolah 23,86%; 2) Masih/Sedang Sekolah 16,45%; dan 3) Tidak Sekolah Lagi 59,69%.¹⁴

Tabel 2. Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan pada Tahun 2008

No.	Karakteristik	Nasional	Papua
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,27%	23,86%
2.	Masih/Sedang Sekolah	17,34%	16,45%
3.	Tidak Sekolah Lagi	81,40%	59,69%

Sumber: Diolah dari Data Kemenpora, lihat catatan kaki 14.

Dengan demikian, jumlah pemuda yang tidak atau belum pernah sekolah di Provinsi

¹⁴<http://www.kemenpora.go.id/pdf/PENYAJIAN%20DATA%20INFORMASI%20KEMENTERIAN%20PEMUDA%20DAN%20OLAHRAGA%20TAHUN%202009.pdf>.

Papua paling tinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 23,86%; setelah itu urutan kedua Provinsi Papua Barat 5,10%; selanjutnya Sulawesi Barat 3,66%; sementara provinsi lainnya masih di bawah 1%. Selain itu, bila dilihat dari pemuda yang tidak bersekolah lagi atau mereka yang telah menyelesaikan pendidikan untuk Provinsi Papua hanya 59,69%, disusul Provinsi NAD 71,98%, dan provinsi lainnya di atas kisaran 80%.¹⁵

b. Rata-Rata Penduduk Papua Tamatan SD

Melihat persentase pemuda Papua yang berpendidikan tertinggi yang ditamatkan maka untuk Provinsi Papua persentase pemuda yang terbanyak adalah mereka yang tidak tamat SD 32,49%, disusul oleh tamatan SMA 24,72%, dan yang terkecil adalah tamatan PT 4,08%. Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya maka pemuda Papua yang tidak tamat SD tertinggi di Indonesia, kemudian Gorontalo 27,70%, Sulawesi Barat 20,74%, sedangkan yang terendah DIY 1,73%.¹⁶

Selanjutnya, perempuan Papua yang tidak tamat SD 41,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 23,38%. Tamatan SD, SMP, SMA, dan PT meskipun laki-laki lebih banyak dari perempuan, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 20,01% pemuda Papua belum mampu membaca dan menulis atau buta huruf.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Pendidikan Pemuda Papua Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	23,38	41,11	32,49
2.	Tamat SD	19,14	16,13	17,59
3.	SMP	23,58	18,77	21,11
4.	SMA	29,94	19,78	24,72
5.	PT	3,95	4,21	4,08

Sumber: Diolah dari Sakernas, BPS dan Penyajian Data, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Jika dilihat data seluruh anak Indonesia yang hanya bersekolah sampai 6,6 tahun, angka anak-anak yang bersekolah di Papua dan Indonesia masih amatlah rendah.

¹⁵ <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/332/>.

¹⁶ <http://kemenpora.go.id/menpora/statistikkepemudaan2010.pdf>.

3. Angkatan Kerja Usia Muda di Papua

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua pada tahun 2007 sebanyak 70,93%. Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 69,88% dan sebagian besar angkatan kerja berada di daerah pedesaan.¹⁷

Angkatan kerja Provinsi Papua sebanyak 1.166.346 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar angkatan kerja di Papua didominasi oleh penduduk usia muda (pemuda) sebanyak 889.328 orang. Angkatan kerja tersebut bila dikaitkan dengan tingkat partisipasi dalam pendidikan maka masih didominasi oleh mereka yang tidak/belum tamat SD sejumlah 755.689 orang dan yang terkecil adalah tamatan perguruan tinggi sebanyak 73.116 orang.¹⁸

Ada 8 jenis keterampilan dasar yang dimiliki oleh para angkatan kerja di Papua, yaitu otomotif, listrik/elektro, bangunan, teknik mekanik, tata niaga, aneka kejuruan, pariwisata, dan pertanian. Di antara 8 keterampilan utama tersebut, angkatan kerja di Papua sebagian besar memiliki keterampilan yang terkait dengan aneka kejuruan sebanyak 29.835, sedangkan bidang listrik/elektro sebanyak 18.217 orang, pertanian 1.915, otomotif 1.720 orang, teknik mekanik 1.115.¹⁹

Namun jika kita amati, hampir tidak ada anak-anak Papua yang bekerja di sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran. Ini amat menyayat hati. Karena itu, *training* khusus bagi anak-anak Papua agar memiliki keterampilan di bidang pariwisata, otomotif, administrasi, dan keuangan menjadi suatu keniscayaan bila kita ingin menyerap tenaga kerja anak-anak Papua asli.

¹⁷ <http://www.scribd.com/doc/50175901/22/Tingkat-Partisipasi-Angkatan-Kerja>, lihat juga "Profil Ketenagakerjaan Papua Barat 2009" Sakernas Papua Barat 2009, |BPS Prov. Papua Barat 2009 dan "Profil Ketenagakerjaan Papua 2009," Sakernas Papua 2009, BPS Papua 2009.

¹⁸ <http://tabloidjubi.com/jayapura/7509-jumlah-angkatan-kerja-papua-naik-701-persen?device=xhtml>; lihat juga, lihat juga, <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/14023694>; lihat juga <http://irjabar.bps.go.id/file/Release%202011/48.%20Keadaan%20Tenaga%20Kerja%20Papua%20Barat%20Agustus%202011.pdf>

¹⁹ Lihat antara lain, <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/LAPO-RAN%20SOSIAL%202007.pdf>

4. Penduduk Berusia Muda yang Bekerja dan Penganggur

Penduduk Papua yang bekerja saat ini berjumlah 1.118.779 orang dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian sebanyak 840.696, sedangkan di bidang jasa kemasyarakatan 114.057, dan yang terkecil ada bidang jasa, keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan. Penganggur terbuka (*open unemployment*) di Papua sebanyak 47.567 orang, dan sebagian besar penganggur di Papua masih didominasi oleh penduduk berusia muda (15–44 tahun) sebanyak 41.736, sedangkan 5.831 di antaranya adalah penganggur berusia di atas 45 tahun. Bila dilihat dari tingkat pendidikan maka penganggur di Provinsi Papua sebagian besar adalah tamatan SMTA Umum sebanyak 17.417 orang. Demikian pula tamatan akademi dan perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 15.639 orang. Penganggur dengan jumlah terendah adalah tamatan SD dan SMTP sebanyak 9.605 orang. Pengangguran terbuka di Papua ternyata sebagian besar tidak mempunyai keterampilan. Hal ini terlihat dari jumlah penganggur berdasarkan keterampilan di mana mereka yang tidak mengikuti kursus keterampilan, yaitu berjumlah 42.079 orang dari 47.567 orang penganggur.²⁰

Perdamaian Papua

Data dasar mengenai Papua tersebut menunjukkan betapa kontrasnya bumi dan penduduk Papua. Kelimpahan kekayaan sepatutnya dapat membawa perdamaian di tanah Papua. Namun, kenyataan menunjukkan kekayaan alam yang melimpah justru menimbulkan persoalan perdamaian di bumi Cenderawasih itu. Penulis mengibaratkan indahnya perdamaian di tanah Papua seperti kita memandang indahnya burung Garuda, Maleo, Manguni, Mambruk, dan Cenderawasih dan bagaimana hubungan di antara mereka.

Garuda atau di India disebut Garud, dalam epos Ramayana adalah burung yang digunakan Rama dan dianggap burung Dewa. Garuda kemudian menjadi lambang negara Indonesia pasca-kemerdekaan yang di lehernya terbentang Pancasila beserta lambang lima silanya.

²⁰ <http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/15065-jumlah-pengangguran-di-papua-capai-60501-orang.html>

Maleo, adalah burung endemik di Sulawesi Utara yang memiliki nama ilmiah *Macrocephalon* karena kepalanya besar. Burung cantik yang hampir punah ini masih dapat kita lihat di Cagar Alam Papua, Kabupaten Pahuwato, Sulawesi. Burung yang indah ini, entah mengapa, di tanah Papua menjadi sinonim dengan unit pasukan elite Komando Pasukan Khusus TNI-AD atau Kopassus yang dulu juga dikenal sebagai Resimen Para Komando Angkatan Darat–RPKAD dan Komando Pasukan Sandi Yudha-Kopasandha. Kata Maleo sempat pula dipopulerkan dalam film “Denias, Senandung di atas Awan” produksi Alenia Pictures (karya pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen). Film Denias mengisahkan seorang anak Papua yang berkawan dan berguru kepada seorang anggota Kopassus yang ia sebut “Maleo”. Denias adalah anak Papua yang sukses dalam studinya sampai ke negeri Kanguru, Australia, namun hingga kini kehilangan sahabat Kopassusnya itu.

Manguni atau disebut juga Mauni, adalah burung yang secara fisik mirip dengan burung hantu. Dalam mitologi Minahasa, burung Manguni ditugaskan oleh Opo Mpung Wangko untuk mengamati sekitar dan selalu memberi petunjuk kepada bangsa Minahasa. Burung ini dianggap burung suci oleh orang Minahasa. Dalam kaitannya dengan Papua, ada seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia asal Minahasa, Dr. G.S.S.J. Ratulangie yang pernah dibuang oleh Belanda ke Pulau Yapen yang kemudian menjadi tokoh yang merangkul warga Serui, Yapen, agar menyatu-padu dengan saudara-saudara Indonesia lainnya. George Aditjondro pernah menyebut Dr. G.S.S.J. Ratulangie sebagai “Burung Manguni yang merindukan deburan Ombak Samudra Pasifik.” Ratulangie adalah seorang visioner yang sudah melihat bagaimana masa depan Indonesia di kawasan Pasifik.

Mambruk adalah sejenis burung berbulu dan bermahkota indah yang hidup di hutan-hutan dataran rendah Papua, khususnya daerah sekitar Biak, Yapen, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Burung Mambruk Victoria, kadang disebut Goura Victoria, berbulu biru keabu-abuan dengan mahkota berwarna biru dan bintik-bintik putih. Burung Mambruk pernah menjadi lambang dari

Papua Merdeka seperti yang dicetuskan oleh beberapa anggota Dewan New Guinea (*Nieuw Guinea Raad*) pada 1 Desember 1961. Lambang Burung Mambruk ini, entah mengapa, amat diharamkan oleh para intel dan pejabat di Jakarta.

Burung Cenderawasih, bahasa ilmiahnya *Paradisaeidae*, lebih dikenal dengan *Bird of Paradise* (Burung Surga) adalah burung yang amat indah yang bisa ditemukan di wilayah bagian timur Papua, Papua Nugini (PNG), dan Australia Timur. Warna dan jenisnya beragam, namun yang paling dikenal adalah yang bulunya berwarna campuran antara hitam, coklat, kuning, dan putih. Cenderawasih adalah burung yang menjadi lambang di Papua dan Papua Nugini.

Masih banyak jenis burung lain yang dikenal dan ada di tanah Papua, dari burung Kasuari (sejenis burung Onta) berkaki kuat, sampai ke burung Nuri Kepala Merah atau Kepala Hitam, burung kakak tua putih dan kakak tua hijau yang semuanya indah. Kakak Tua Putih, Beo Hijau, dan Nuri Kepala Hitam adalah burung-burung cerdas yang mudah diajari bicara. Bila semua burung itu kita lihat di alam bebas atau di taman satwa, ini menunjukkan betapa keberagaman itu memberikan keindahan.

Keindahan dan Konflik

Bila satwa alam itu memberikan keindahan, mengapa keberagaman manusia Indonesia yang memiliki moto “Bhinneka Tunggal Ika” justru menjadi penyebab konflik di antara sesama anak-anak bangsa, termasuk di tanah Papua?

Pemilik kekuasaan di Jakarta yang seakan menjadi pemilik interpretasi tunggal burung Garuda dan didukung oleh burung Maleo yang kepalanya besar (bukan besar kepala), hingga kini masih mencurigai mereka-mereka yang memegang lambang burung Mambruk dan burung Cenderawasih. Burung Manguni yang dulu sering memberikan peringatan mengenai situasi keamanan lingkungan di Papua, dan diterima oleh pemegang lambang burung Mambruk dan Cenderawasih dengan hati yang lapang, kini seakan membisu.

Mengapa Papua hingga kini tetap bergolak, walau meretas jalan menuju Papua yang damai telah berkali-kali diwacanakan dan diterapkan?²¹

²¹ Lihat, antara lain, Muridan S. Widjojo *et al.*, *Papua Road*

Mengapa para penguasa, aparat pertahanan, dan keamanan dan aparat intelijen di Jakarta masih saja curiga kepada manusia Papua yang notabene adalah warga negara Indonesia? Mengapa pula penguasa di Jakarta lebih memilih untuk menjadi “Komprador atau Kaki Tangan Kepentingan Asing” ketimbang sebagai “Pembela Kepentingan Anak-anak Bangsa” di Papua? Apakah burung Maleo dan Intelijen menilai bahwa Papua adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang masih dapat dijadikan tempat latihan tempur dalam arti yang sebenarnya? Mengapa pula ada dualisme pernyataan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan “Tak ada Operasi Militer di Papua” (*Kompas*, 28/10/2011) dan sang adik ipar, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo, yang menyatakan “Senjata Dilawan Senjata” (*Rakyat Merdeka*, 27/10/2011)? Mengapa anak-anak Papua yang berteriak merdeka selalu dihadapi dengan ujung bayonet atau tembakan timah panas atau juga pembunuhan yang keji?

Kita tahu, rentetan kekerasan di Tanah Papua di penghujung 2011 ini telah menjadikan Papua seakan menjadi daerah konflik yang panas. Papua yang kaya sejak dulu telah menjadi, meminjam Manuel Kaisiepo, “Pasar Kekerasan” (*Kompas*, 29/10/2011).²²

Orang sering menginterpretasikan penembakan terhadap buruh-buruh di Freeport yang menuntut kenaikan upah, terbunuhnya Kapolsek Mulia (Kabupaten Puncak Jaya) Ajun Komisaris Polisi Dominggus Octavianus Áwes, penembakan ke Posko Brimob di Puncak Jaya dan perlakuan kasar aparat terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura adalah suatu rentetan

Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008). Lihat juga, Paskalis Kossay, S.Pd., M.M., *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi*. (Jakarta: Tollelegi, 2011). Lihat juga berbagai artikel yang dimuat di *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 3, No. 1, 2006 bertajuk “Papua Menggugat”.

²² Soal operasi militer dan konflik di Tanah Papua, lihat, antara lain Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*, *Policy Studies 5*, (Washington D.C.: East-West Center Washington, 2004); lihat juga, Paskalis Kossay, *Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Tollelegi, 2011); Al Araf, *et al.*, *Sekuritisasi Papua. Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, (Jakarta: Imparsial, 2011); Yusron Ihza, *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*, (Bandung: Mizan, 2009), Edisi yang diperbaharui, Desember.

kejadian yang saling terkait. Semua kejadian itu secara kebetulan terjadi secara berentetan. Kalau pun kekerasan di Papua itu adalah sebuah rekayasa, sulit untuk mengatakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang OPM (Organisasi Papua Merdeka). Para pelaku dari penembakan atau pembunuhan itu selalu disebut dengan istilah “orang/kelompok bersenjata tidak dikenal.”

Bisa saja kelompok OPM berupaya mengail di air keruh, tapi jika melihat kejadian di Bandara Mulia, sangat tidak mungkin dua orang OPM melakukan pembunuhan terhadap seorang Kapolsek secara terang-terangan di muka umum, di bandara yang banyak polisinya. OPM biasanya melakukan penyerangan secara berkelompok dan bukan perorangan atau berdua. Jika benar polisi setempat sudah mengetahui siapa sesungguhnya pembunuh Kapolsek Mulia, mengapa tidak diungkap saja secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan yang buruk?

Kita juga menyayangkan mengapa penanganan terhadap para peserta Kongres Rakyat Papua III begitu kasar dan pembunuhannya begitu keji. Jika tiga orang yang mati itu berada di belakang kantor Korem yang berseberangan dengan lapangan bola Zakheus di Abepura itu, kita patut bertanya, siapa pembunuh mereka? Mengapa sampai ada dua korban yang dicongkel matanya dan seorang lagi disiksa begitu keji dengan benda tajam dari anus sampai ke badan? Benarkah laporan dari lapangan yang menyatakan ada unit Maleo yang menyamar dengan seragam tentara organik setempat saat penyerangan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III itu dilakukan? Kita tentunya tidak berburuk sangka bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Kopassus. Namun, kita berharap agar Kopassus yang diberi nama burung Maleo yang indah itu tidak menjelma menjadi “Suwanggi” yang di Papua artinya “hantu”.

Jika aparat keamanan sudah mengetahui sedari awal bahwa Kongres akan berakhir dengan pernyataan politik merdeka, mengapa kongres tersebut tidak dihentikan sejak awal oleh polisi? Mengapa pula penyerangan baru dilakukan dua jam setelah kongres usai? Kita bertanya, mengapa masih ada orang atau kelompok yang tega ingin membakar Papua melalui pembunuhan yang keji terhadap orang Papua. Jika itu dilakukan oleh

aparat keamanan negara, mengapa itu terjadi? Apakah mereka berharap agar Papua membara sehingga penambahan pasukan atau logistik menjadi sesuatu yang mereka dambakan? Tak heran bila Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa Papua masih menjadi “Pasar Kekerasan”! Mereka lupa bahwa orang Papua dalam 10 tahun terakhir ini adalah manusia yang amat sabar dan tidak mau melakukan serangan balik atau balas dendam. Segala yang mereka perjuangkan dilakukan secara damai. Tengok misalnya betapa kerusakan besar tidak terjadi setelah Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh Kopassus pada dini hari 11 November 2001, setelah ia menghadiri perayaan Hari Pahlawan yang diselenggarakan Kopassus pada malam 10 November 2001.

Sampai makalah ini ditulis, Juli 2012, masih banyak konflik yang terjadi di tanah Papua, seperti penembakan terhadap orang asing (Jerman) pada pertengahan 2012, adanya demo-demo anarkis dari kelompok anak-anak muda Papua di wilayah Jayapura, terjadinya penembakan misterius oleh orang yang dikategorikan oleh aparat keamanan sebagai Orang Tidak Dikenal (OTK) yang sudah memakan korban jiwa lebih dari sepuluh orang. Ini semua tentunya amat memilukan hati.

Kebijakan yang Tidak Konsisten

Kebijakan pemerintah Pusat soal Papua benar-benar sangat tidak konsisten. Tengok misalnya penerapan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sangat tidak konsisten. Agus Sumule dalam tulisannya berjudul “Niat Luhur yang Bisa Berujung Malapetaka” mengungkapkan betapa banyak hal-hal yang tidak konsisten yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, hanya kurang dari dua tahun setelah UU Otsus berlaku, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres No. 1/2003 mengenai Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Kedua, mengapa mesti ada perbedaan antara syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon anggota Majelis Rakyat Papua? Calon Gubernur Papua tidak boleh pernah ditahan, kecuali karena aktivitas politiknya. Ini berarti mereka yang pernah berseberangan dengan negara boleh menjadi gubernur Papua. Mengapa klausul untuk

calon anggota MRP malah tidak boleh pernah aktif berpolitik melawan negara?

Ketiga, pemerintah Pusat tidak pernah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Otsus di Papua sejak 2002. Akan tetapi, mengapa pula Presiden SBY mengeluarkan Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat yang menafikan kekhususan Papua? Inpres itu kini diperbaharui menjadi Perpres No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dan Perpres No. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat. Esensinya tetap sama, bukan mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melainkan mengambil-alih otoritas pemerintah di Papua! Ini berarti kita kembali ke gaya lama yang menjadikan orang-orang Papua sebagai penonton pembangunan dan bukan pemilik dari pembangunan itu sendiri.

Orang banyak mengatakan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua sangat besar, tetapi mari kita lihat kenyataannya. Antara 2000–2009 pemerintah pusat menerima uang sebesar AS\$7.996.392.017 dari Freeport.²³ Pada kurun waktu yang sama, pemerintah hanya memberikan hampir 20 triliun rupiah kepada Papua. Kalau antara 2002–2011 dana Otsus hampir mencapai 30 triliun rupiah, angka itu tidak besar untuk Papua. Sejak 2006 dana Otsus harus dibagi antara Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari 2,6 triliun rupiah setiap tahunnya, dibagi untuk Papua dua per tiga dan Papua Barat sepertiganya atau 70% untuk Papua dan 30% untuk Papua Barat. Itu pun harus dibagi antara provinsi yang mendapatkan 40% dan kabupaten yang mendapatkan 60%. Jika kabupaten ada 29, berarti satu kabupaten mendapatkan sekitar 53 miliar rupiah sampai 60 miliar rupiah tergantung besaran penduduk.²⁴ Bila membangun jalan di pegunungan tengah membutuhkan 15 miliar rupiah per kilometer jalan aspal, bisa dibayangkan berapa tahun prasarana jalan di Papua bisa

dibangun dengan dana Otsus. Hitungan kasarnya, ini memerlukan 100–150 tahun lebih!

Bagaimana pula dengan pembangunan kampung di Papua melalui dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) yang besarnya 100 juta rupiah per tahun per kampung? Respek yang digabung dengan PNPM Mandiri dari pemerintah pusat ini tidak jarang hanya menjadi proyek bagi-bagi duit di kampung-kampung. Belum lagi ada dugaan bahwa dana Respek dan dana Otsus disunat untuk membayar utang atau berfoya-foya pejabat-pejabat pemerintah di tanah Papua.

Membangun Papua dengan hati bukan semudah yang diucapkan Presiden SBY. Tanpa adanya keseriusan, yang terjadi adalah tetap bertahannya kecurigaan pemerintah pusat kepada pemerintah dan rakyat Papua. Seandainya Garuda dan Maleo mau memahami Manguni, Mambruk, dan Cenderawasih, irama pembangunan Papua lebih enak didengar.

Penutup: Dengarlah Suara Hati Orang Papua

Di antara persoalan besar yang ada di Papua, di antaranya berkisar pada persoalan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Mari kita dengar kisah di bawah ini. “Kitorang (kami) butuh guru dan tenaga kesehatan, Kitorang tara (kami tidak) butuh tentara dan polisi. Daerah ini aman-aman saja. Kalau bapak ibu guru silakan masuk, tentara atau polisi tidak boleh masuk!” Kalimat itu dilontarkan oleh sekelompok orang yang melakukan pencegahan terhadap rombongan para guru yang baru saja direkrut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya untuk ditempatkan di sekolah-sekolah di pedalaman Puncak Jaya.

Jika kita telaah kalimat di atas, tampak jelas bahwa bagi rakyat Papua yang kritis atau tidak percaya kepada pemerintah pusat, mereka merasa kehidupan mereka tak perlu diganggu oleh kehadiran aparat keamanan. Sejak dulu orang Papua merasa terganggu oleh kehadiran aparat keamanan yang membunuh orang Papua atau membakar kampung-kampung di Papua saat mereka mencari para pendukung atau anggota OPM. Dalam bahasa rakyat biasa, perlakuan

²³ Data diolah dari laporan PT Freeport Indonesia; lihat juga, <http://www.indonesiainancetoday.com/read/12673/Divestasi-936-Saham-Freeport-Dinilai-Lamban>.

²⁴ Lihat, antara lain, Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua (tahun 2002–2009), tanpa tahun.

aparatus ibarat “Mengganggu ketenangan hidup” yang dalam bahasa Pidgin di PNG dikenal dengan kalimat “*Bagarapim sindaun*” (mengganggu orang yang sedang duduk enak-enak). Rakyat Papua di mana pun mereka berada, butuh pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah dan juga tersedianya guru-guru yang benar-benar berdedikasi untuk kemajuan anak-anak Papua dan adanya kesempatan yang baik bagi mama-mama Papua untuk berdagang atau berusaha.

Kita melihat bagaimana semakin hari semakin sedikit guru-guru dari Tanah Toraja, Kei, Minahasa, atau tanah Jawa yang mau bertugas di daerah-daerah terpencil di tanah Papua. Ini karena nasib mereka sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ini karena insentif untuk mengajar di daerah-daerah yang sunyi dari keramaian itu memang amatlah kecil. Tidaklah mengherankan jika pemerintah daerah di Papua berupaya keras memberi insentif yang memadai antara 5 juta sampai 15 juta rupiah per bulan agar mereka mau mengajar di daerah terpencil. Dilihat dari masalah keamanan, dalam sejarah Papua, sangat kecil kejadian di mana ada guru atau tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang Papua, bahkan dari anggota OPM sekalipun.

Bila kita teliti lebih lanjut, persoalan Papua dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya, memang bertumpu pada tiga hal pokok: pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi rakyat. Dari tiga hal itu saja tampak jelas betapa Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat adalah yang terendah di Indonesia, yaitu menduduki nomor buncit 32 untuk Provinsi Papua dan nomor 33 untuk Papua Barat.

Semakin hari semakin tertinggal mutu pendidikan anak-anak Papua di pedalaman. Semakin hari semakin banyak pula tenaga kesehatan yang meninggalkan puskesmas di pedalaman. Kalau pun ada tenaga kesehatan, obat-obatan pun sulit didapat. Dari segi ekonomi rakyat, bila kita masuk ke pasar-pasar tradisional di Papua dan Papua Barat, amat sulit menemukan adanya “Mama-Mama Papua” yang berdagang di pasar. Mereka telah tersingkir ke pelataran pasar, toko atau di trotoar jalan. Apa yang dilakukan pemerintah kota Jayapura yang memberi tempat khusus sementara di seberang Hotel Yasmin,

Jayapura, bagi “Mama-Mama Papua” untuk berdagang di malam hari, adalah contoh baik untuk membantu perekonomian rakyat kecil Papua.

Kurangnya perhatian pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat menyebabkan rasa frustrasi yang berkepanjangan pada sebagian besar rakyat Papua. Jawaban atas frustrasi itu bukanlah menembaki mereka yang berdemonstrasi atau mengadakan Kongres Rakyat Papua, melainkan bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi itu semakin diperhatikan.

“Mari kita membangun Papua dengan hati”, dan “Tak ada Operasi Militer di Papua”. Dua penggalan kata itu diucapkan kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi perkembangan politik di tanah Papua akhir-akhir ini. Kita hanya berharap agar apa yang diucapkan oleh Presiden Yudhoyono itu benar adanya dan akan dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat dan daerah serta aparat keamanan di daerah.

Apa yang terjadi di sekitar Lapangan Bola Zakheus, Abepura pada 19 Oktober 2011 adalah suatu yang menyayat hati kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Betapa tidak. Jika berupaya memahami dengan hati yang bersih, apa yang disuarakan oleh Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung tiga hari, 17–19 Oktober 2011, itu sebenarnya bukanlah suara kemerdekaan, melainkan mereka ingin agar suara hati orang-orang Papua didengar oleh pemerintah pusat.

Dari informasi yang penulis dapatkan, panitia sudah berupaya untuk mendapatkan gedung yang layak bagi pertemuan itu, yaitu meminjam gedung Gelanggang Olah Raga (GOR) di Jayapura dan Gedung Konvensi milik Universitas Cenderawasih di Abepura. Akan tetapi, mereka tidak dibolehkan untuk menggunakan aset-aset negara bagi kongres mereka. Karena itu, mereka menggunakan lapangan bola yang dimiliki oleh Sekolah Katolik di Abepura yang letaknya hanya 1 kilometer dari Markas Zeni Tempur Angkatan Darat di Waena dan hanya 200 meter dari Markas Korem 172 Abepura.

Para aparat keamanan, polisi, dan TNI, tentunya sudah mengetahui apa yang akan disimpulkan oleh Kongres Rakyat Papua itu.

Karena itu, mengapa mereka tidak berupaya untuk mendekati panitia secara baik-baik dan malah melakukan penyerangan ketika suara kemerdekaan mereka dengarkan. Pertanyaannya kemudian ialah, mengapa anak-anak Papua yang juga anak-anak Indonesia itu diperlakukan secara tidak wajar ketika mereka menghindari aparat keamanan dan melarikan diri ke daerah perbukitan di sekitar itu?

Kata “Merdeka” sebenarnya bukanlah harga mati. Mereka hanya ingin agar pemerintah pusat mendengarkan suara hati mereka yang merasa tidak ada perubahan mendasar pada nasib anak-anak Papua setelah 10 tahun Otonomi Khusus diberlakukan di Papua dan 6 tahun di Papua Barat. Apa yang mereka lontarkan di Abepura melalui “Seminar Damai di Tanah Papua, 5–7 Juli 2011” dan “Kongres Rakyat Papua III pada 17–19 Oktober 2011” adalah *political gathering* atau kumpul-kumpul politik untuk mempersiapkan dialog yang lebih manusiawi antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Papua. Mereka ingin agar pemerintah dan rakyat Papua duduk bersama membicarakan masa depan Papua. Jika bukan kemerdekaan yang mereka dapatkan, apa yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua?

Mereka tahu pasti bahwa Otsus yang berjalan selama 10 tahun ini telah gagal memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat di Papua. Mereka tahu ada yang tidak beres yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi di Papua dan Papua Barat serta kabupaten-kabupaten di Papua. Mereka juga telah sering mengadu kepada pemerintah pusat, tetapi hingga detik ini pemerintah pusat tidak pernah melakukan evaluasi mendasar atas pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat.

Harapan kepada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) bukanlah hal yang baru, karena sudah dilontarkan oleh Presiden Yudhoyono pada 4 tahun yang lalu. Adanya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin oleh Letjen (Purn.) Bambang Dharmono adalah suatu yang baru.

Ada beberapa “titipan pesan” teman-teman di Papua kepada penulis agar disampaikan kepada Letjen Purn. TNI Bambang Dharmono. Pertama, unit ini harus mulai mengevaluasi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 10 tahun melalui dana Otsus yang jumlahnya sudah mencapai hampir 30 triliun rupiah. Apakah dana Otsus tersebut sudah benar-benar digunakan untuk pembangunan empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat kecil, dan infrastruktur jalan/jembatan. Jika sudah, bagaimana pemerintah daerah membagi uang yang dua per tiga untuk Provinsi Papua dan sepertiga untuk Papua Barat. Bagaimana juga uang yang diberikan kepada setiap kabupaten yang jumlahnya antara 53 miliar sampai 60 miliar rupiah, penggunaannya untuk apa. Jika benar ada uang dana Otsus yang digunakan untuk membayar utang atau untuk foya-foya para kepala daerah, pemerintah pusat tidak perlu takut untuk membawa para pelaku korupsi itu ke pengadilan tipikor.

Kedua, bagaimana pula penerapan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di kampung-kampung Papua dan Papua Barat yang jumlahnya 100 juta rupiah per kampung per tahun dari pemerintah provinsi dan ada juga dana tambahan antara 100 juta sampai 200 juta rupiah per tahun dari pemerintah kabupaten, tergantung kemampuan kabupatennya. Apakah dana PNPM Mandiri yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk para instruktur pendamping sudah juga digunakan secara tepat guna. *

Ketiga, membangun Papua harus sesuai dengan kebutuhan orang Papua. Karena itu, jangan sampai unit ini hanya berkantor di Jakarta, para pejabatnya dari pimpinan, deputi, dan stafnya hanya duduk di Jakarta dan semua petugasnya adalah orang Jakarta. Orang-orang cerdas dan perancang Papua juga harus diikutsertakan agar orang Papua merasa pembangunan sesuai dengan kepentingan mereka bersama dan bukan kepentingan Jakarta semata. Berkaca dari Aceh yang kantor Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) berkantor di Banda Aceh, unit ini juga harus memiliki kantor di Jayapura dan atau Manokwari.

Keempat, Bambang Dharmono juga harus mengusulkan kepada pemerintah pusat agar

membedakan mana yang diurus oleh pemerintah pusat dan mana yang diurus oleh pemerintah daerah, agar ada kejelasan mana dana APBD yang digunakan pemerintah daerah dan mana anggaran khusus Otsus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang digunakan unit P4B. Ini untuk menghindari ketersinggungan pemerintah daerah yang seakan diintervensi oleh pusat dan agar penggunaan dana tepat guna. Selain itu, bagaimana pula hubungan koordinasi kerja antara UP4B dan kementerian-kementerian yang juga memiliki perencanaan pembangunan di Papua.

Kelima, perlu adanya indikator keberhasilan atas percepatan pembangunan di Papua. Tanpa memperhatikan butir-butir tersebut, seberapa banyak pun dana Otsus digelontorkan ke Papua, tak akan ada manfaatnya bagi rakyat Papua. Kita berharap, kali ini pemerintah pusat sungguh-sungguh ingin membangun Papua dan Papua Barat dengan hati, dan bukan mengharubirukan perasaan rakyat Papua yang merasa dimarginalisasikan oleh pusat.

Apa yang ditulis Paskalis Kossay dan teman-teman Papua tentang Papua tentunya jauh lebih lengkap dari tulisan ini. Bila orang Papua dan pemerintah membaca buku Paskalis atau buku-buku lain yang ditulis anak-anak Papua yang setia kepada NKRI, tentunya kita dapat menemukan saripati dari persoalan/akar konflik di Papua dan menemukan solusinya. Karya mereka tidaklah mengemukakan mitos, melainkan kenyataan yang ada di tanah Papua. Karena itu, buku-buku karya mereka amat berharga bukan saja untuk mengisi tambahan khazanah kepustakaan mengenai Papua, tetapi juga untuk implementasi konkret jalan damai konflik di Papua.

Daftar Pustaka

- Araf, Al *et al.* 2011. *Sekuritisasi Papua. Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Chauvel, Richard dan Ikrar Nusa Bhakti. 2004. *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies. Policy Studies 5*. Washington D.C.: East-West Center Washington.
- http://dpu-papua.blogspot.com/2010_04_11_archive.html. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://www.bisnis.com/articles/pemogokan-freeport-rugikan-negara-rp57-3-miliar-per-hari>. Diakses 2 Agustus 2012.

- <http://satunegeri.com/referendum-rakyat-indonesia-untuk-tutp-freeport.html>, Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://www.satunegeri.com/95-%-cadangan-freeport-ada-di-Indonesia.html>.<http://satunegeri.com/95-cadangan-freeport-ada-di-indonesia.html>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://satunegeri.com/tegakkan-keaulatan-di-tambang-freeport-bukan-sekedar-renegosiasi.html>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://www.bisnis.com/articles/pemogokan-freeport-rugikan-negara-rp57-3-miliar-per-hari>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://tabloidjubi.com/index.php/jayapura/11766-ipm-papua-paling-terendah-perlu-ditingkatkan>. Diakses 2 Agustus 2012.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menurut_IPM. Diakses 1 Agustus 2012.
- <http://www.docstoc.com/docs/66364566/Laporan-Akhir-EKPD-2010-Provinsi-Papua-oleh-Universitas-Cenderawasih>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://www.google.co.id/search?q=kepadatan+penduduk+papua&hl=id&client=firefox-a&hs=k9J&rls=org.mozilla:enUS:official&prmd=imvns&tbn=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ffAhUNm5JozLrQe3qICYCA&ved=0CFwQsAQ&biw=1360&bih=627>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/9400.pdf>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/50174117/Statistik-Daerah-Prov-Papua-Barat-2010-pdf>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/9400.pdf>. Diakses 4 Agustus 2012.
- http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://www.batukar.info/wiki/demografi-papua>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://aweidabii.blogspot.com/2011/09/tingkat-putus-sekolah-dan-buta-huruf-di.html>. Diakses 1 Agustus 2012.
- <http://www.kemenpora.go.id/pdf/PENYAJIAN%20DATA%20INFORMASI%20KEMENTERIAN%20PEMUDA%20DAN%20OLAH-RAGA%20TAHUN%202009.pdf>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/332/>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://kemenpora.go.id/menpora/statistikpemudaan2010.pdf>. Diakses 4 Agustus 2012.

- <http://www.scribd.com/doc/50175901/22/Tingkat-Partisipasi-Angkatan-Kerja>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://tabloidjubi.com/jayapura/7509-jumlah-angkatan-kerja-papua-naik-701-persen?device=xhtml>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/14023694/>. Diakses 1 Agustus 2012.
- <http://irjabar.bps.go.id/file/Release%202011/48.%20Keadaan%20Tenaga%20Kerja%20Papua%20Barat%20Agustus%202011.pdf>. Diakses 4 Agustus 2012.
- <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/LAPORAN%20SOSIAL%202007.pdf>. Diakses 2 Agustus 2012.
- <http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/15065-jumlah-pengangguran-di-papua-capai-60501-orang.html>. Diakses 1 Agustus 2012.
- <http://www.indonesiainancetoday.com/read/12673/Divestasi-936-Saham-Freeport-Dinilai-Lamban>. Diakses 1 Agustus 2012.
- Ihza, Yusron. 2009. *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*. Bandung: Mizan, Edisi yang diperbaharui, Desember.
- Kaisiepo, Manuel. "Pasar Kekerasan", *Kompas*, 29 November 2011.
- Kossay, Paskalis. 2011. *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi*. Jakarta: Tollelegi.
- Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 3. No. 1 2006. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tahun 2002–2009), Tanpa Tahun.
- Profil Ketenagakerjaan Papua Barat 2009. *Sakernas Papua Barat 2009*. Provinsi Papua Barat: BPS.
- Widjojo, Muridan S. *et al.* 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.